



Kembali Raih Opini WTP



WTP: Pemkab Sambas terima penghargaan atas Opini WTP dari BPK P Kalbar.

SAMBAS - Pemerintah Kabupaten Sambas kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat. Sehingga Pemkab Sambas meraih predikat tertinggi ini di 2018, 2019 dan 2020.

Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili Lc MH secara resmi menerima LHP LKPD TA 2020 dari Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmadi di Kantor BPK RI Perwakilan Prov Kalimantan Barat, Jumat (7/5). Bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sambas H Abu Bakar Spd I, Sekretaris Daerah Sambas, Ir H Fery Madagaskar MSI, Inspektur Kabupaten Sambas H Rasyiden SH MH, Kepala Bakedua Sambas H Rachmat Robby SE ME dan Plt Sekretaris DPRD, Drs H Sunaryo MSI. "Alhamdulillah Laporan Hasil Pemeriksaan sudah diterima dan Pemkab Sambas mendapat predikat Wajar

Tanpa Pengecualian. Ini sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan dan membenahi penyelenggaraan laporan keuangan daerah semakin menjadi lebih baik kedepannya," kata Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH usai menerima opini dari BPK P Kalbar.

Capaian ini, sebut Atbah yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Sambas ini, menunjukkan komitmen baik pemerintah daerah beserta jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Bupati menegaskan, akan tetap menjadikan perhatian penting dan prioritas hasil pemeriksaan tersebut. "Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya," kata Bupati. Kemudian berkaitan dengan rekomendasi dari BPK RI, diharapkan kepada jajarannya untuk segera menindaklanjutinya.

Atbah juga menyampaikan raihan ini, men-

jadi berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sambas di saat Ramadan. "Ini adalah berkah Kabupaten Sambas disaat Ramadan," katanya.

Sekretaris Daerah H Fery Madagaskar mengakui, capaian opini WTP masih menyisakan pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Yakni terdapat rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar yang harus ditindaklanjuti. "InsyaAllah pemerintah daerah komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI. Sesuai arahan Bupati dan dukungan dari DPRD,

bersama-sama segera akan ditindaklanjuti beberapa catatan penting dari LHP tersebut," kata Sekda.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas H Rachmat Robby mengatakan momentum penyerahan LHP LKPD 2020, BPK RI menyampaikan 2 buah buku laporan. Terdiri laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan dan laporan

hasil pemeriksaan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Alhamdulillah LKPD tahun 2020 Pemda Kab Sambas kembali mendapat predikat opini WTP, ini sebagai bentuk keseriusan pemda kab sambas menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Dan masih banyak yang bisa dilakukan bersama sebagai upaya penyempurnaan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah," kata Robby. Mengenai hal yang menjadi perhatian BPK, pemerintah daerah diberi waktu 60 hari menindaklanjuti rekomendasi. (fah)